

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
INSTISARI .....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Konseptual.....	17
1. Daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia.....	17
2. Model Otorita sebagai penyelenggara Kawasan Khusus.....	27
3. Kedudukan Kepala Daerah (Khusus dan Istimewa) & Kepala Otorita pada Kawasan Khusus.....	36
4. Kewenangan Pemerintahan.....	43
5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	56
B. Landasan Teori .....	62
1. Teori Desentralisasi Asimetris.....	63
2. Teori Peraturan Perundang-undangan .....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	75

B.	Bahan Penelitian .....	76
C.	Alat Penelitian .....	78
D.	Jalannya Penelitian .....	78
E.	Analisis Hasil Penelitian .....	79
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>81</b>
A.	Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara .....	81
1.	Politik Hukum Pembentukan Pemerintahan Khusus Ibu Kota Nusantara .....	82
2.	Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara .....	93
3.	Potret Pemberlakuan Desentralisasi Asimetris pada Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara .....	96
a.	Paradigma Baru Pemberlakuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 .....	97
b.	Model Hybrid Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara .....	111
B.	Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Membentuk Peraturan Perundang-undangan.....	121
1.	Kewenangan Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara . .....	123
a.	Sumber Kewenangan Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara .....	124
b.	Jenis dan Hierarki Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara .....	130
c.	Materi Muatan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara .....	133
2.	Praktik Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	140
a.	Prosedur Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ..	141
b.	Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	144
c.	Praktik Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	152
d.	Pengujian Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara .....	156
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>159</b>



A.	Kesimpulan.....	159
B.	Saran .....	162
DAFTAR PUSTAKA .....		164